

## Edukasi dan Perancangan *Roadmap* Kelurahan Inklusif Untuk Menyokong UNESA Sebagai Kampus Ramah Disabilitas

Rianda Usmi<sup>\*1</sup>, Budi Santosa<sup>2</sup>, Firre An Suprpto<sup>3</sup>, Muhammad Ridho Prihatin<sup>4</sup>, Vito Dafanda Febriansah<sup>5</sup>, Achmad Faried Irfany<sup>6</sup>

<sup>1,2,5,6</sup> Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

<sup>3</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

<sup>4</sup> Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya

\*e-mail: [riandausmi@unesa.ac.id](mailto:riandausmi@unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [budisantosa@unesa.ac.id](mailto:budisantosa@unesa.ac.id)<sup>2</sup>, [firresuprpto@unesa.ac.id](mailto:firresuprpto@unesa.ac.id)<sup>3</sup>, [muhammadprihatin@unesa.ac.id](mailto:muhammadprihatin@unesa.ac.id)<sup>4</sup>, [vito.23133@mhs.unesa.ac.id](mailto:vito.23133@mhs.unesa.ac.id)<sup>5</sup>, [achamadfariedirfany10@gmail.com](mailto:achamadfariedirfany10@gmail.com)<sup>6</sup>

Received:  
03.11.2025

Revised:  
21.11.2025

Accepted:  
11.12.2025

Available online:  
05.01.2026

**Abstract:** *This Community Service Programme (PKM) aims to design a roadmap for inclusive urban village policies to support Surabaya State University (UNESA) as a disability-friendly campus. UNESA Campus 1, located in Ketintang Urban Village, Surabaya, has been recognised as a disability-friendly campus, but it is not yet supported by the local community and urban village government. Many public facilities in the Ketintang community do not yet have disability-friendly accessibility. The PKM method consists of three stages, namely the preparation, implementation, and evaluation stages. The preparation stage focuses on needs analysis, material design, and activities. The implementation stage consists of educational material presentations and roadmap design. The evaluation stage consists of reflection and feedback. Indicators of the success of this community service activity are a minimum of 75% of participants and follow the activity until completion, a minimum of 75% of participants declare a commitment to creating an inclusive-disability-friendly environment, and the preparation of 1 roadmap policy for implementing an inclusive village. This PKM activity successfully developed a roadmap for inclusive sub-district policies. The development of the roadmap involved various stakeholders, including academics, the government, and the disabled community. The resulting roadmap is very important as a long-term guideline in creating an inclusive social environment, both in terms of infrastructure, public services, and accommodation for disabled groups.*

**Keywords:** *UNESA, disability-friendly campus, inclusive sub-district, roadmap.*

**Abstrak:** Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan atau berfokus pada edukasi dan perancangan *roadmap* kebijakan kelurahan inklusif guna menyokong Universitas Negeri Surabaya (UNESA) sebagai kampus ramah disabilitas. Kampus 1 UNESA yang berlokasi di Kelurahan Ketintang Surabaya telah mendapatkan pengakuan sebagai kampus ramah disabilitas, akan tetapi belum disokong oleh masyarakat dan pemerintah kelurahan setempat. Banyak sarana prasarana umum di masyarakat Ketintang belum memiliki aksesibilitas yang ramah disabilitas. Metode PKM meliputi tiga tahapan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan difokuskan pada analisis kebutuhan, perancangan materi dan kegiatan. Tahap pelaksanaan berupa paparan materi dan perancangan *roadmap*. Tahap evaluasi berupa refleksi dan umpan balik. Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yakni minimum 75% peserta hadir dan mengikuti kegiatan sampai selesai, minimum 75% peserta menyatakan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif-ramah disabilitas; dan tersusunnya 1 *roadmap* kebijakan penyelenggaraan kelurahan inklusif. Kegiatan PKM ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan inklusif, serta berhasil menyusun *roadmap* kebijakan kelurahan inklusif. Penyusunan *roadmap* melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pemerintah, dan komunitas penyandang disabilitas. *Roadmap* yang dihasilkan sangat penting sebagai pedoman dalam menciptakan lingkungan sosial yang inklusif, baik dari aspek infrastruktur, layanan publik, maupun akomodasi untuk kelompok disabilitas.

**Kata kunci:** UNESA, kampus ramah disabilitas, kelurahan inklusif, *roadmap*.

### 1. PENDAHULUAN

Universitas Negeri Surabaya (UNESA) telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas. UNESA mendapatkan penghargaan "Kampus Peduli Disabilitas" dari Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) tahun 2024 sebagai pengakuan atas upaya UNESA dalam mendukung aksesibilitas dan kesejahteraan mahasiswa dengan disabilitas (<https://unesa.ac.id/keren-unesa-terima-penghargaan-kampus-peduli-disabilitas-dari-ppdi>). UNESA juga meraih penghargaan sebagai perguruan tinggi ramah disabilitas dalam ajang

Beritajatim Award 2024 (<https://www.unesa.ac.id/keren-unesa-raih-penghargaan-kampus-ramah-disabilitas-dalam-beritajatim-awards-2024>). Kemudian, UNESA juga pada tahun 2023 mendapatkan dua penghargaan sekaligus oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Anugerah ini masing-masing dalam subkategori perguruan tinggi peduli disabilitas dan perguruan tinggi akademik penyelenggara program Merdeka Belajar Kampus Merdeka mandiri. Terbaru, akhir tahun 2024 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNESA mendapatkan Penghargaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) (<https://www.unesa.ac.id/fisipol-raih-penghargaan-pelayanan-publik-ramah-kelompok-rentan-terbaik-2024-dari-kemenpan-rb>).

Dengan semua upaya dan penghargaan yang diperoleh, UNESA berkomitmen untuk terus menjadi kampus yang peduli dan ramah terhadap penyandang disabilitas. Penghargaan yang diterima merupakan bukti nyata dari dedikasi universitas dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung untuk mewujudkan kampus yang peduli dengan kelompok disabilitas.

Namun, keadaan ini belum disokong oleh masyarakat dan pemerintahan setempat, yakni masyarakat dan kelurahan Ketintang. Banyak sarana prasarana umum di masyarakat Ketintang tidak memiliki aksesibilitas fisik yang ramah disabilitas. Berdasarkan analisis situasi, hasil observasi, wawancara dengan mitra yakni Lurah Ketintang, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mitra, antara lain; secara umum di masyarakat ketintang belum disosialisasikan bahwa UNESA menjadi kampus yang berkomitmen terhadap disabilitas, sehingga masyarakat juga tidak mengetahui bahwa UNESA memiliki kebijakan penerimaan mahasiswa baru disabilitas setiap tahunnya. Implikasinya, masyarakat Ketintang belum memiliki wawasan yang baik bagaimana bersikap dan memperlakukan mahasiswa disabilitas ketika berinteraksi di lingkungan masyarakat. Dengan kata lain masyarakat belum memiliki pengetahuan yang baik tentang nilai-nilai inklusi sosial. Masalah lain, sarana prasarana umum di masyarakat Ketintang seperti jalan umum, tempat ibadah, warung makan, bahkan kostan-kostan milik masyarakat tidak memiliki aksesibilitas fisik yang ramah disabilitas. Padahal dukungan dan keterlibatan masyarakat Ketintang penting untuk menyokong UNESA sebagai kampus ramah disabilitas yang berkelanjutan.



Gambar 1. Infrastruktur Fisik di Ketintang

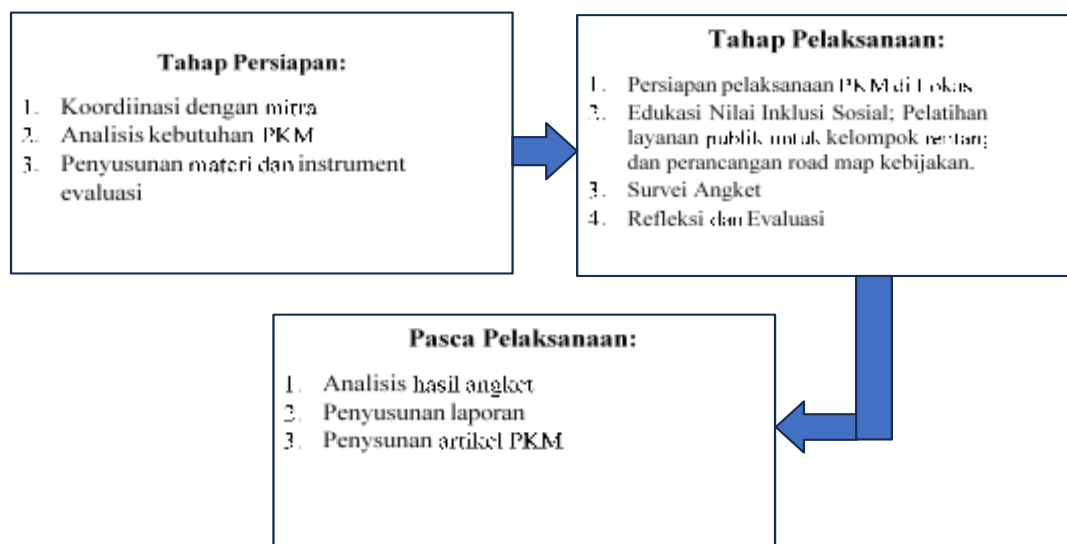
Mengacu pada permasalahan mitra di atas, ruang lingkup kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada dua kegiatan utama. Pertama, edukasi warga dan perangkat kelurahan berkaitan dengan nilai-nilai inklusi sosial melalui pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab; kedua, perancangan *roadmap* kebijakan kelurahan inklusif untuk menyokong UNESA sebagai kampus ramah disabilitas. Oleh karenanya, program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan; pertama, memberikan edukasi untuk memperkuat kesadaran masyarakat serta aparat Kelurahan Ketintang tentang nilai-nilai inklusi sosial dan prinsip masyarakat inklusif; kedua, membangun komitmen kelurahan dalam mengimplementasikan perspektif inklusi ke dalam program pembangunan masyarakat dengan merancang *roadmap* kebijakan kelurahan inklusif. Edukasi warga dan

perancangan *roadmap* kebijakan kelurahan inklusif merupakan langkah strategis untuk menciptakan lingkungan sosial yang ramah bagi penyandang disabilitas dalam kehidupannya di masyarakat.

Kelurahan Ketintang dipilih sebagai lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat karena merupakan wilayah yang bertetangga langsung dengan Kampus UNESA Ketintang. Implikasinya, banyak hunian kostan maupun pusat usaha ekonomi masyarakat, sehingga sangat relevan untuk diadakan program yang dapat memperkuat nilai-nilai inklusivitas terhadap keberagaman karakteristik mahasiswa UNESA Kampus Ketintang. Bagi UNESA, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi wadah sinergi antara dunia akademik dan masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan ramah disabilitas. Implementasi konsep inklusi di tingkat kelurahan diharapkan dapat menjadi model bagi wilayah lain dalam mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif. Dengan demikian, UNESA tidak hanya berperan sebagai pusat pembelajaran, tetapi juga sebagai katalisator perubahan sosial yang berkelanjutan dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan setara.

## 2. METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan melalui tahap persiapan dan perencanaan kegiatan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan penyusunan laporan pasca PKM. Tahap persiapan meliputi analisis situasi dan kebutuhan mitra, persiapan materi, dan persiapan fasilitas. Tahap pelaksanaan berupa paparan materi dan diskusi kelompok terumpun (FGD) terkait kerangka kebijakan, *timeline*, dan konten *roadmap*. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara offline yang disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan lokasi kegiatan. Tahap pasca-PKM berupa pelaksanaan evaluasi, umpan balik, dan bantuan teknis lain yang dibutuhkan oleh para peserta. Tahap pelaporan adalah mengumpulkan materi yang diserahkan dan data sekunder lainnya, kemudian menyusunnya menjadi laporan kegiatan pelayanan masyarakat. Berikut bagan alur kegiatan PKM.



Gambar 2. Alur kegiatan PKM

Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2025 yang dirancang dalam bentuk sosialisasi edukasi dan diskusi kelompok terumpun, melibatkan 35 peserta yang terdiri dari dosen/akademisi ahli UNESA, perangkat Kelurahan Ketintang, RW, RT, tokoh agama dan masyarakat, kelompok Ibu-Ibu PKK, serta masyarakat Ketintang termasuk pemilik hunian kos-kosan dan pemilik UMKM setempat. PKM ini dirancang dalam tiga tahapan utama, yang meliputi: pertama, pemaparan materi sosialisasi tentang nilai-nilai inklusi sosial, kelompok disabilitas, dan UNESA Kampus Ramah Disabilitas; kedua, dialog interaktif-diskusi kelompok terumpun; terakhir konsolidasi rancangan

*roadmap* dan umpan balik reflektif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode *instructional Focus Group Discussion*, yaitu suatu bentuk penyampaian informasi dan tanya jawab dalam diskusi secara multi-arah sehingga peserta terlibat secara aktif.

Kegiatan PKM ini dianggap berhasil jika 75 % dari peserta hadir dan mengikuti kegiatan sampai selesai yang diverifikasi dengan presensi kehadiran. Keberhasilan juga diukur dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan inklusif. Peningkatan kesadaran masyarakat diukur dengan menghitung skor persentase yang diperoleh dari angket yang dikembangkan dengan skala likert 1-5 yakni pernyataan persetujuan dan/atau ketidaksetujuan peserta dalam hal penciptaan lingkungan yang inklusif-ramah disabilitas setelah kegiatan PKM dilakukan. Berikut skala likert 1-5 yang dikembangkan.

Tabel 1. Angket PKM dengan Skala Likert 1-5

| No | Pernyataan                                                                                               | Sangat Tidak Setuju | Tidak Setuju | Netral | Setuju | Sangat Setuju |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|--------|---------------|
| 1  | Saya memahami konsep kelurahan inklusif setelah mengikuti kegiatan ini                                   | 1                   | 2            | 3      | 4      | 5             |
| 2  | Saya mengetahui hak-hak penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat                             | 1                   | 2            | 3      | 4      | 5             |
| 3  | Saya menyadari pentingnya menciptakan lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas                  | 1                   | 2            | 3      | 4      | 5             |
| 4  | Materi Edukasi yang disampaikan mudah dipahami dan relevan dengan kondisi masyarakat Kelurahan Ketintang | 1                   | 2            | 3      | 4      | 5             |
| 5  | Saya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif-ramah disabilitas                            | 1                   | 2            | 3      | 4      | 5             |

Ket: Peserta memilih dengan melingkari satu skor dari masing-masing pernyataan

Merujuk pada item angket dengan skala likert di atas, PKM ini dikatakan berhasil apabila hasil dari angket tersebut dapat memenuhi minimum 75% peserta menyatakan setuju dalam hal penciptaan lingkungan sosial yang inklusif di Kelurahan Ketintang, Surabaya. Adapaun secara keseluruhan kriteria/indikator keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dinilai berhasil dengan baik, apabila: (1) minimum 75% peserta hadir dan mengikuti kegiatan sampai selesai; (2) minimum 75% peserta menyatakan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif-ramah disabilitas; (3) terakhir, berhasil disusunnya 1 *roadmap* kebijakan penyelenggaraan kelurahan inklusi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini yang berupa edukasi dan perancangan *roadmap* kelurahan inklusif untuk menyokong UNESA sebagai kampus ramah disabilitas menunjukkan hasil yang baik atau positif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya berhasil menyusun satu *roadmap* kebijakan penyelenggaraan kelurahan inklusi, akan tetapi juga berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan inklusif. Lingkungan inklusif adalah lingkungan yang menuntut terciptanya suasana sosial yang terbuka, ramah, bebas dari hambatan, serta memberikan rasa nyaman dan aman bagi seluruh warganya (Probosiwi, 2017). Lingkungan inklusif mengakui dan menghargai perbedaan lintas dimensi budaya, mempromosikan diskusi terbuka, mengakomodasi beragam kebutuhan, menumbuhkan kesetaraan, serta memastikan semua anggota merasa dihormati dan terhubung (Clark & Dickerson, 2022).

Lingkungan yang inklusif sejatinya adalah representasi dari tatanan masyarakat yang disebut masyarakat inklusif. Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang memiliki kesadaran sikap maupun perilaku yang mengedepankan nilai-nilai inklusi sosial, yakni mengedepankan kesetaraan, membangun dan mengembangkan lingkungan yang terbuka, menerima segala perbedaan budaya, suku, etnis, agama, karakteristik, maupun status sosial dan kondisi keadaan fisik seseorang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kearney (2011) bahwa masyarakat inklusif menghargai semua

anggota tanpa memandang etnis, agama, status sosial ekonomi, kemampuan, maupun kecacatan, serta mempromosikan partisipasi dan kesetaraan. Masyarakat inklusif mendorong inklusi sosial dengan mempromosikan kesetaraan, mengembangkan lingkungan terbuka, dan menerima beragam perbedaan dalam budaya, etnis, agama, karakteristik, status sosial, dan kondisi fisik, yang pada akhirnya meningkatkan hubungan sosial, kohesi, partisipasi, dan modal sosial (Warsilah, 2015) (Hedetoft, 2013).

Sasaran dalam membangun masyarakat inklusif pada kegiatan pengabdian masyarakat ini diupayakan terbentuk di masyarakat Kelurahan Ketintang, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur. Kelurahan Ketintang dipilih sebagai tempat kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini karena wilayah administratifnya yang bertetangga langsung dengan Kampus UNESA Ketintang yang menjadi kampus ramah disabilitas, sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi wadah sinergi antara dunia akademik yakni Kampus UNESA dengan masyarakat setempat sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan lingkungan sosial yang inklusif. (Putra, 2024) mengemukakan bahwa konsep inklusif dapat menjadi landasan petunjuk dalam membangun masyarakat sosial yang menerima berbagai keberagaman yang ada. Sebagai konsep sosial, inklusif menekankan pentingnya rasa memiliki, penerimaan, pengakuan, serta keterlibatan partisipatif yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik (Eldiva et al., 2023) juga menjelaskan bahwa partisipatif yang besar akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap terwujudnya masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini akan mendorong terciptanya kebijakan dan praktik sosial yang responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini penting dilakukan setidaknya karena dua tujuan utama. Pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat Kelurahan Ketintang Surabaya tentang pentingnya penciptaan lingkungan sosial yang inklusif, termasuk ramah terhadap kelompok disabilitas. Kedua, merancang *roadmap* kebijakan kelurahan inklusif guna menyokong UNESA sebagai kampus ramah disabilitas. Berikut potret pelaksanaan kegiatan PKM “Edukasi Masyarakat Inklusif” yang dilakukan di Kelurahan Ketintang, Surabaya.



Gambar 3. Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan PKM edukasi masyarakat inklusif ini dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2025. Kegiatan dirancang dalam bentuk sosialisasi edukasi dan diskusi kelompok terumpun, melibatkan 35 peserta yang terdiri dari dosen/akademisi ahli UNESA, perangkat Kelurahan Ketintang, RW, RT, tokoh agama dan masyarakat, kelompok Ibu-Ibu PKK, serta masyarakat Ketintang termasuk pemilik hunian kos-kosan dan pemilik UMKM setempat. Kegiatan edukasi ini menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai inklusi sosial pada masyarakat. Nilai-nilai inklusi yang harus dibangun dalam masyarakat inklusif sebagaimana yang dikemukakan oleh Solhaug & Osler (2017) yaitu ada empat. Empat nilai tersebut di antaranya: 1) keadilan, keadilan diartikulasikan dalam istilah bahwa adil ialah ketika setiap orang harus diperlakukan sama, dan ketika setiap orang harus diperlakukan berbeda, dengan kata lain memperlakukan orang secara setara; 2) pengakuan, tuntutan untuk pengakuan dibingkai dalam istilah nilai intrinsik semua manusia, serta pengakuan dan penghormatan atas perbedaan

setiap manusia; 3) penentuan nasib sendiri, nilai ini dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk memegang kendali atas hidupnya, yang berarti tidak boleh ada hambatan untuk menentukan nasib sendiri serta partisipasi bagi setiap individu tanpa terkecuali; 4) solidaritas, nilai solidaritas menyuarakan keyakinan untuk mengidentifikasi dan bertindak dalam kesatuan di masyarakat dalam tuntutan untuk keadilan dan pengakuan. Nilai solidaritas mencerminkan pandangan horizontal tentang kewarganegaraan, yang sama pentingnya dengan hubungan antar warga negara dalam hubungan vertikal yaitu antara negara dan individu.

Kegiatan PKM ini berhasil memberikan edukasi tentang nilai-nilai inklusi untuk Warga Ketintang Surabaya, dengan 75% peserta hadir dan mengikuti kegiatan sampai selesai; kemudian 100% peserta menyatakan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif-ramah disabilitas. Kehadiran yang sekurang-kurangnya 75% peserta mengikuti acara sampai selesai, artinya menunjukkan tingkat penerimaan masyarakat yang relatif tinggi terhadap materi edukasi, serta dapat pula mengindikasikan kuatnya kesadaran dan kemauan masyarakat untuk bersama-sama menerapkan nilai-nilai inklusi. Sementara capaian 100% komitmen peserta, maka dapat dipastikan artinya bahwa secara keseluruhan semua peserta memberikan respon "sangat setuju" (Skor 5) untuk menciptakan lingkungan sosial yang inklusif. Hal ini mencerminkan telah terbentuknya kesepahaman normatif dan dukungan kolektif untuk bersama-sama membangun kelurahan yang inklusif bagi semua kelompok, terkhusus penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Di samping itu, *roadmap* kelurahan inklusif yakni kelurahan ramah disabilitas dan kelompok rentan juga berhasil disusun. Penyusunan *roadmap* ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pemerintah, dan komunitas penyandang disabilitas. Kelurahan, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat memiliki komitmen yang sama untuk menyediakan fasilitas serta pelayanan yang memadai bagi penyandang disabilitas di masyarakat. Saat ini, kelurahan tidak hanya dipandang sebagai simbol kehadiran negara di tengah masyarakat, tetapi juga memiliki peranan penting dalam menjalankan pemerintahan dengan lebih fleksibel. Fleksibilitas ini memungkinkan kelurahan untuk lebih mandiri dalam mengelola hak-hak dasar dan memenuhi kebutuhan warganya secara lokal, termasuk dalam memberikan perhatian dan layanan bagi kelompok marjinal seperti penyandang disabilitas (Siregar, 2020). Murwaningsih dan wedjajati (2021) mengemukakan bahwa penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok marjinal dan kelompok rentan, karena keterbatasan kemampuan dalam berinteraksi serta adanya kesulitan bergabung dan berpartisipasi dalam kelompok kemasyarakatan. Oleh karena itu, *roadmap* yang dihasilkan ini sangat penting sebagai pedoman dalam menciptakan lingkungan sosial yang inklusif, baik dari aspek infrastruktur, layanan publik, maupun akomodasi untuk kelompok disabilitas. Berikut *roadmap* yang dihasilkan dari kegiatan PKM ini berkaitan dengan penyelenggaraan kelurahan inklusif.



Gambar 4. Roadmap Penyelenggaraan Kelurahan Ramah Disabilitas & Kelompok Rentan

Berdasarkan gambar *roadmap* di atas, penyelenggaraan kelurahan inklusif (ramah disabilitas & kelompok rentan) terdiri dari 5 periode/fase penting dan satu kesatuan yang harus berjenjang atau bertahap dilakukan. **Periode/Fase Pertama**, yakni 1 tahun awal adalah persiapan. Pada periode ini yang dilakukan yaitu:

- Pembentukan Tim Adhoc penyelenggaraan kelurahan ramah disabilitas & kelompok rentan;
- Analisis kondisi & kebutuhan: Baik itu kelurahan maupun kondisi dan kebutuhan di masyarakat dengan metode SWOT;
- Update data kependudukan khususnya data disabilitas dan kelompok rentan di kelurahan.

Fase ini sangat penting dan vital untuk membangun fondasi awal keberhasilan penyelenggaraan kelurahan inklusif. Di mulai dengan membentuk tim ad-hoc, tim ini dapat melakukan analisis kebutuhan awal, mengupdate data kependudukan, serta memfasilitasi kolaborasi antar semua pemangku kepentingan, yakni pemerintah kelurahan, kampus, dan organisasi masyarakat. Berkaitan dengan tugas ini, Tim Ad-Hoc dapat melakukan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Metode SWOT ini akan sangat membantu dalam memahami realitas situasi di masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya, kekuatan dan kelemahan serta memetakan tantangan yang akan dihadapi, sehingga nantinya akan dapat memandu formulasi kebijakan yang efektif (Pearce et al., 2022).

**Periode Kedua**, yakni 1 tahun kedua adalah merancang, merumuskan dan menetapkan Kebijakan. Pada periode ini yang dilakukan adalah:

- Membuat Regulasi/Kebijakan/Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan kelurahan ramah disabilitas dan kelompok rentan;
- Melibatkan disabilitas/kelompok rentan serta pemerhati kelompok rentan dalam pembuatan regulasi/kebijakan/program kelurahan ramah disabilitas & kelompok rentan

Selama periode kedua, fokusnya adalah pada pembuatan peraturan dan kebijakan untuk penyelenggaraan kelurahan inklusif yang ramah disabilitas dan kelompok rentan. Proses ini melibatkan penyandang disabilitas dan kelompok rentan dalam fase perumusannya untuk memastikan kebutuhan dan perspektif dua kelompok ini terwakili secara memadai. Pelibatan ini akan semakin meningkatkan inklusivitas dan juga menjunjung tinggi prinsip representasi (Surwanti & Istiyanti, 2021; Sulastuti & Andreas, 2022).

**Periode Ketiga**, yakni selama 3 tahun, kelurahan menyiapkan/menyediakan dan membangun aksesibilitas. Aksesibilitas yang dibangun diantaranya:

- Aksesibilitas Fisik (Seperti: jalur pemandu, Jalan landai, area parkir khusus, area ramah anak, dst-nya);
- Aksesibilitas Informasi & Komunikasi (Seperti rambu dan marka, Website dan Aplikasi Seluler, Media sosial)

Pemenuhan aksesibilitas fisik maupun aksesibilitas informasi dan komunikasi sangat penting dalam penyelenggaraan kelurahan inklusif yang ramah disabilitas dan kelompok rentan. Penyediaan aksesibilitas fisik berupa infrastruktur akan memungkinkan mobilitas mandiri dan rasa aman bagi kelompok disabilitas dalam beraktivitas di masyarakat. Adapun penyediaan aksesibilitas informasi dan komunikasi dapat memfasilitasi partisipasi yang setara dan akses yang sama ke informasi-informasi yang diperlukan (Tuakora & Rolobessy, 2024).

**Periode Keempat**, selama 1 tahun, kelurahan melakukan pengembangan SDM di antaranya berupa pelatihan sensitivitas disabilitas. Pelatihan sensitivitas disabilitas ini harus dimasukkan dan dijalankan dalam peta jalan penyelenggaraan kelurahan inklusif. Hal ini sebagai langkah untuk memastikan dukungan berkelanjutan dan pemeliharaan praktik inklusif di masyarakat. Studi Ngambut (2023). telah membuktikan bahwa pelatihan sensitivitas disabilitas terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan meningkatkan akses layanan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan.

Adapun periode terakhir, yaitu **periode kelima** ialah dalam jangka waktu 1 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, mengukur keberhasilan sejauh mana ketercapaian kebijakan

penyelenggaraan kelurahan inklusif (ramah disabilitas & kelompok rentan), kemudian mengumpulkan umpan balik, serta merancang langkah-langkah keberlanjutan untuk periode selanjutnya. Penyelenggaraan kelurahan inklusif tentu memerlukan kajian pemantauan dan evaluasi yang komprehensif untuk menilai efektivitas dan keberlanjutan ke depannya dari kebijakan tersebut. Studi Sholichah et al., (2025). telah mengungkapkan bahwa kebijakan dan pemberdayaan masyarakat inklusif harus melibatkan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk menilai keberhasilan dalam aksesibilitas, kemudian untuk memastikan bahwa kebijakan tetap efektif dan responsif terhadap kelompok-kelompok yang termarginalkan yang dalam hal ini kelompok penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Pemantauan yang efektif, evaluasi yang komprehensif, umpan balik yang partisipatif, dan langkah-langkah keberlanjutan yang visioner akan terus meningkatkan kesadaran dan praktik inklusi sosial di masyarakat (Pananrangi & Marsuki, 2024; Rof'ah et al., 2022)

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan. Tantangan dalam setiap kegiatan pelatihan adalah sesuatu keniscayaan, di antaranya dalam tahap perencanaan kegiatan PM sempat terjadi pergantian/mutasi Lurah. Implikasinya, lurah yang baru belum mengetahui perihal kegiatan PKM serta kerja sama antara Kelurahan Ketintang dengan Tim PKM UNESA. Maka dari itu, Tim PKM kembali membangun komunikasi dan koordinasi lagi, serta memohon izin dan kesediaan kelurahan untuk melaksanakan kegiatan PKM ini. Terakhir, program PKM ini perlu dilanjutkan dengan pendampingan realisasi *roadmap* kelurahan inklusif, agar lingkungan sosial yang inklusif yakni masyarakat yang mengedepankan kesetaraan, keterbukaan, penerimaan terhadap segala perbedaan baik budaya, suku, etnis, agama, karakteristik, maupun status sosial dan kondisi keadaan fisik, serta lingkungan yang memastikan semua anggota merasa dihormati dan terhubung dapat terwujud.

#### 4. KESIMPULAN

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi dan perancangan *roadmap* kelurahan inklusif untuk menyokong UNESA sebagai kampus ramah disabilitas menghasilkan dampak yang positif bagi masyarakat. PKM ini berhasil memberikan edukasi tentang nilai-nilai inklusi pada Warga Ketintang Surabaya, serta edukasi bagaimana bersikap terhadap kelompok penyandang disabilitas. Lebih dari 75% peserta hadir dan mengikuti kegiatan sampai selesai, dan 100% masyarakat berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif-ramah disabilitas di Kelurahan Ketintang Surabaya. PKM ini juga berhasil menyusun satu *roadmap* kelurahan inklusif yakni kelurahan yang ramah disabilitas dan kelompok rentan. Pelaksanaan PKM yang berhasil merancang *roadmap* kelurahan inklusif dengan sinergi tiga elemen "*triple-helix*" yakni perguruan tinggi (Kampus UNESA), Pemerintah Kelurahan Ketintang, dan komunitas penyandang disabilitas menjadi kelebihan PKM ini. Akan tetapi, program PKM ini tentu masih memiliki keterbatasan, yang mana produk yang dihasilkan baru *roadmap*, belum tahap realisasi dari *roadmap* tersebut. Oleh karenanya, pengembangan PKM berikutnya perlu dilanjutkan dengan pendampingan realisasi *roadmap* penyelenggaraan kelurahan inklusif ini. Kemudian, dapat dikembangkan juga dengan mengadakan PKM berupa pelatihan bagi perangkat Kelurahan Ketintang dalam memberi layanan publik bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan, seperti pelatihan bahasa isyarat, simulasi pelayanan langsung, dan lain sebagainya.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada LPPM Universitas Negeri Surabaya yang telah memberikan dana melalui Skema PKM Masyarakat Lingkungan Kamous. Terima kasih juga disampaikan kepada Kelurahan dan Masyarakat Ketintang yang telah mendukung dan menyukseskan kegiatan PKM ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Clark, A., & Dickerson, C. (2022). Creating inclusive learning environments. *University of Hertfordshire*, 6(1), 1–4.
- Eldiva, F. T., Jofipasi, R. A., Anwar, A. R. K., & Annisa, R. (2023). Peningkatan kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap individu disabilitas. *JPPKh Lectura: Jurnal Pengabdian Pendidikan Khusus*, 1(2), 10–17. <https://doi.org/10.31849/jppkhlectura.v1i2.17206>
- Hedetoft, U. R. (2013). Social inclusion: Inaugural editorial. *Social Inclusion*, 1(1), 1–2. <https://doi.org/10.17645/SI.V1I1.102>
- Kearney, A. (2011). "Preliminary Material". In *Exclusion from and Within School*. Leiden, The Netherlands: Brill. Retrieved Dec 20, 2025, from <https://brill.com/view/book/9789460914997/BP000001.xml>
- Murwaningsih, S., Wedjajati, R. S., Studi, P., Sosial, P., Yogyakarta, K., & Yogyakarta, D. I. (2021). Penerimaan masyarakat kepada penyandang disabilitas (studi desa inklusi peduli dengan kelompok rentan di Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo). *SOSIO PROGRESIF: Media Pemikiran Studi Pembangunan Sosial*, 1(1), 41–57. <https://doi.org/10.47431/sosioprogresif.v1i1.120>
- Ngambut, K. (2023). Pelatihan sanitasi inklusi mewujudkan akses sanitasi layak bagi penyandang disabilitas di Kelurahan Babau Kabupaten Kupang. *PengabdianMu*, 8(2), 233–238. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v8i2.4136>
- Pananrangi, A.M., & Marsuki. (2024). The village head's strategy to enhance social inclusion in bulo-bulo village pujananting district barru regency. *International Journal of Education, Social Studies, and Management*, 4(2), 341–356. <https://doi.org/10.52121/ijessm.v4i2.254>
- Pearce, E., Kamenov, K., Barrett, D., & Cieza, A. (2022). Promoting equity in health emergencies through health systems strengthening: Lessons learned from disability inclusion in the COVID - 19 pandemic. *International Journal for Equity in Health*. 21(S3). <https://doi.org/10.1186/s12939-022-01766-6>
- Probosiwi, R. (2017). Desa inklusi sebagai perwujudan pembangunan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(3), 215–226. <https://doi.org/10.31105/mipks.v41i3.2255>
- Putra, L. B. W. (2024). Mewujudkan kota inklusi: Inklusivitas dan aksesibilitas ruang publik bagi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. *TheJournalish: Social and Government*, 5(2), 203–214. <https://doi.org/10.55314/tsq.v5i2.780>
- Ro'fah, H., & Suprihatiningrum, J. (2022). The long road to social inclusion: Participation of vulnerable groups in village development. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 225–284. <https://doi.org/10.14421/jpm.2022.062-05>
- Sholichah, H., Hafidz, A., Fajar, A., & Kunci, K. (2025). Systematic literature review: Pemberdayaan masyarakat inklusif untuk mewujudkan keadilan sosial. *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora)*, 11(1), 27–40. <https://doi.org/10.29303/jseh.v11i1.664>
- Siregar, A. P. (2020). Melawan stigma diskriminatif: Strategi pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Panggunharjo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 4(1), 27–50. <https://doi.org/10.14421/jpm.2020.041-02>
- Solhaug, T., & Osler, A. (2018). Intercultural empathy among Norwegian students: an inclusive citizenship. *International Journal of Inclusive Education*, 22(1), 89–110. <https://doi.org/10.1080/13603116.2017.1357768>
- Sulastuti, S., & Andreas, R. (2022). Disability-friendly public means through the public services regulation: Realizing a disability friendly in Bandar Lampung City. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 655–662. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220102.090>
- Surwanti, A., & Istiyanti, E. (2021). Penyiapan desa ramah bagi disabilitas. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 2392–2400. <https://doi.org/10.18196/ppm.47.726>
- Tuakora, S. C., & Rolobessy, M. J. (2024). Pemenuhan aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang

disabilitas di Kecamatan Baguala Kota Ambon. *Journal of Government Science Studies*, 3(2), 77–84. <https://doi.org/10.30598/jgssvol3issue2page78-85>

Warsilah, H. (2015). Inclusive development approach for reducing social exclusion in urban areas: a case study of marginal groups in Kampung Semanggi, Solo, Central Java. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 17(2), 207–232. <https://doi.org/10.14203/jmb.v17i2.283>

**Internet:**

<https://unesa.ac.id/keren-unesa-terima-penghargaan-kampus-peduli-disabilitas-dari-ppdi>

<https://www.unesa.ac.id/keren-unesa-raih-penghargaan-kampus-ramah-disabilitas-dalam-beritajatim-awards-2024>

<https://www.unesa.ac.id/ramah-disabilitas-dan-mbkm-mandiri-bawa-unesa-raih-2-penghargaan-kemendikbudristek>

<https://www.unesa.ac.id/fisipol-raih-penghargaan-pelayanan-publik-ramah-kelompok-rentan-terbaik-2024-dari-kemenpan-rb>